



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
2022**

## KATA PENGANTAR


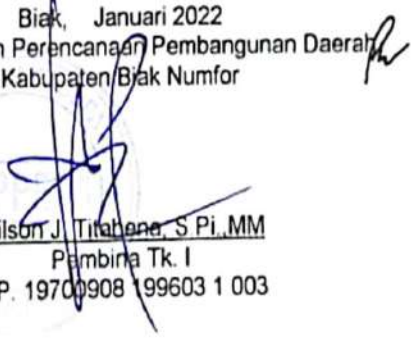
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP BAPPEDA 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (RENJA) 2021 yang telah disusun. LKIP Tahun 2021 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2021, dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Berkelanjutannya Pandemi Covid-19 di tahun 2021 turut mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah termasuk Kinerja Bappeda dalam penyerapan, *refocusing* anggaran dan rencana pelaksanaan program / kegiatan. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 guna mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

Penyusunan LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Biak, Januari 2022  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor

  
  
Wilson J. Titahena, S.Pi.,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 197009081996031003



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari Program/Kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan demikian perlu komitmen yang kuat agar di tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berkesinambungan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi .....	3
1.4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .....	9
1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor.....	10
1.6. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 .....	14
2.3 Rencana Kinerja Program.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	22
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.....	30
B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ....	38
C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ....	41
3.2 Akuntabilitas.....	44
3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum.....	45
BAB IV PENUTUP .....	46



---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi-misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan *update* terhadap perkembangan dunia saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya, yang merujuk pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Pemerintah melalui kementerian yang berwenang.

### 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda yang dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, sebagai berikut :

#### a. Kedudukan

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Bappeda

Bappeda Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; penyelenggaraan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
6. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

### 1.3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi

Kepala Badan

Sekretariat;

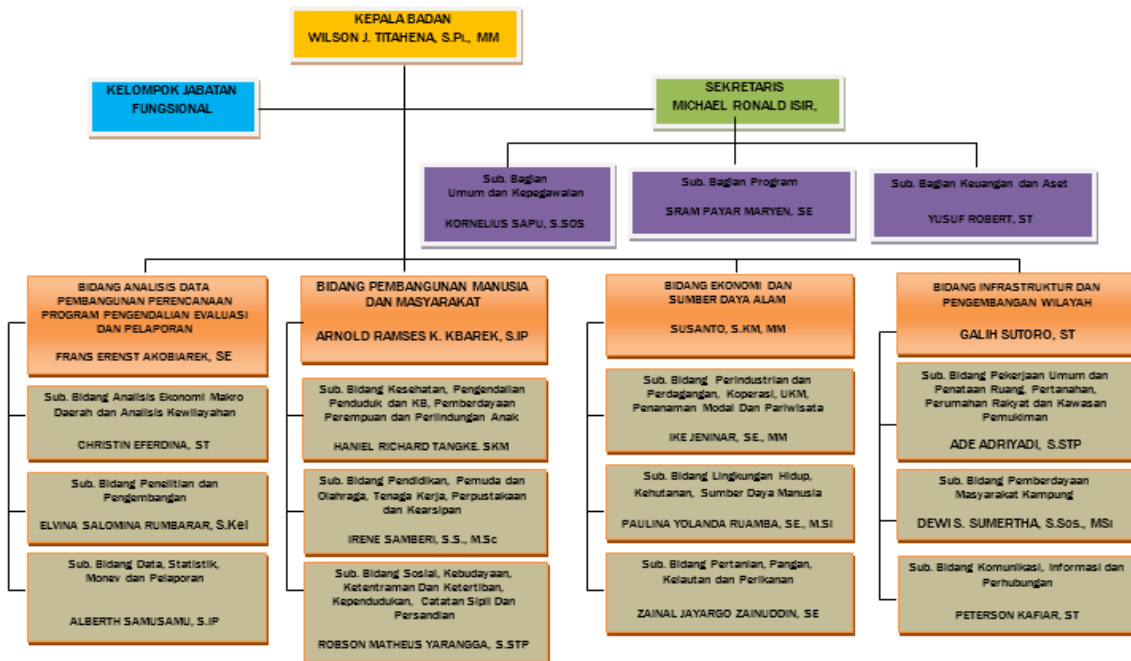
Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah;

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Biak Numfor



b. Tata Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
2. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
4. Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
5. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dirinci sebagai berikut :

1). Kepala

Kepala Bappeda mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan.

Kepala Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## 2). Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a). Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b). Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c). Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d). Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e). Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Badan;
- f). Penyusunan Program Badan;
- g). Penatausahaan urusan umum ;
- h). Penatausahaan kepegawaian;
- i). Penatausahaan Keuangan; dan
- j). Pengelolaan inventaris Badan

## 3). Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu tugas-tugas kepala badan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan, Penelitian dan Pengembangan serta Data Statistik Monev dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah di bidang Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pembangunan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;
- c) Pnganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;



- d) Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbanan sebagai kebijakan peyelenggaraan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan;
  - e) Penyusunan perencanaan program pembangunan dan pengembangan pemeritahan Daerah;
  - f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang penelitian dan pengembangan;
  - g) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penelitian dan pembangunan menyusun lapporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan;
  - h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang penelitian dan pengembangan;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang Sosial Budaya, dan Pemerintahan;
  - j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Pendidikan, Inovasi dan Teknologi;
  - k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan;
  - l) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian pembangunan daerah dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - m) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Sosial Budaya;
  - n) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam ranngka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah;
  - o) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - p) Menyajikan dan mengamankan data imformasi pembangunan daerah; dan
  - q) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4). Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda Olahraga, tenaga kerja, Perpustakaan, Kebersihan serta urusan Sosial, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Kependudukan dan Catatan Sipil dan Persandian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya bidang pembangunan manusia mempunyai fungsi :

- a) Mengkordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- c) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- d) Penganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;

- e) Pengoptimalan peran dan fungsi pembangunan manusia dan masyarakat sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
  - f) Penyusunan perencanaan program pembangunan manusia dan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat;
  - g) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - h) Pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  - k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial, Kebudayaan, Trantib BUN Linmas, Adminduk;
  - m) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Manusia dan Masyarakat, unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - n) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial Budaya;
  - o) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
  - p) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 5). Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, sumber daya manusia, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d) Penyusunan perencanaan Program pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - f) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - g) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
  - h) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pemabngunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - k) Penyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - l) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
  - m) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya
- 6). Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Peerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Komunikasi, Informasi dan Perhubungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e) Penyusunan perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- g) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah;
- h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman;
- i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tranmigrasi;
- j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

#### 1.4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

##### a. Kepegawaian

Bappeda didukung oleh 39 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Kepala Badan, yang mayoritas berpendidikan S1 serta memiliki ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jenis kelamin : 9 orang perempuan dan 30 orang laki-laki.
- b. Berdasarkan pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Jumlah
- Tamat S2	6 orang
- Tamat S1	23 orang
- Sarjana Muda	1 orang
- Tamat SLTA	8 orang
- Tamat SLTP	1 orang

- c. Berdasarkan Golongan :

Golongan	Jumlah
- Golongan IV b	1 orang
- Golongan IV a	-
- Golongan III d	9 orang
- Golongan III c	12 orang
- Golongan III b	5 orang
- Golongan III a	5 orang
- Golongan II d	1 orang
- Golongan II c	-
- Golongan II b	5 orang
- Golongan II d	1 orang

#### b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 30 unit dengan 10 unit dalam kondisi rusak berat dan 20 unit roda 2 (dua) dalam kondisi baik dan kepemilikan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 8 unit, 6 unit dalam kondisi baik dan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak berat. Bappeda Biak Numfor menempati gedung berlantai 2 (dua) yang representative untuk dapat menampung 44 orang pegawai, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

#### c. Anggaran

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Biak Numfor dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Belanja Tidak Langsung Rp. 6.605.068.780,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.720.205.264,- sedangkan pada APBD-P Tahun 2021, Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 6.370.388.780,- dan Belanja Langsung menjadi Rp. 8.356.517.364,- terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan.

### 1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi terkait dengan penelitian dan pengembangan;
- f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Biak Numfor menghadapi permasalahan, yaitu :

1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan belum memadainya kompetensi perencana.
2. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;

3. Terbatasnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan;
4. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feedback dalam proses pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian;
6. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
7. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor.

Permasalahan yang dihadapi tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor maupun Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor, capaian Standar Pelayanan Minimal. Untuk tantangan Bappeda ke depan adalah meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, perubahan paradigma adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, memanfaatkan terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak lain, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengoptimalkan SDM yang tersedia, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang terbatas, dan meningkatkan kemampuan SDM.

## **1.6. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra telah melalui beberapa tahapan koordinasi baik di tingkat internal Bappeda maupun koordinasi bersama Tim di Lingkup Kabupaten Biak Numfor.

Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Bappeda Kabupaten Biak Numfor di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

*“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan kemandirian “*

#### 2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

#### 3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah.

#### 4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran, Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan

## 5. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumber alam
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang masyarakat dan manusia
- d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan

## 6. Kebijakan, Program dan Kegiatan

### a. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi sumberdaya manusia, sarana prasarana, dana dan metode kinerja.
- 2) Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Meningkatkan eksistensi Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

### b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- h) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- j) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan arah kebijakan kabupaten Biak Numfor

dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program/kegiatan serta anggaran dan sumber pendanaan.

Bappeda Biak Numfor telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dibuat antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Biak Numfor, sebagaimana berikut :

## Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

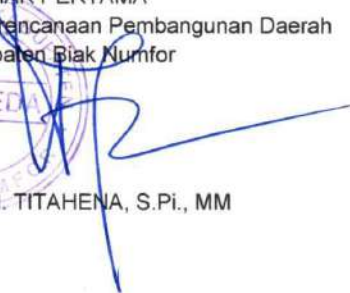
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, Maret 2021

PIHAK KEDUA  
  
HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

PIHAK PERTAMA  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor  
  
WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

## PERJANJIAN KINERJA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak  
 Numfor  
 Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian prpgram serta kegiatan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan (RPJPD/RTRW/RPJMD /RKPD)	3 Dokumen
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2022	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.004.598.700,-	DAU
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 549.999.8000,-	DAU
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp. 900.000.000,-	DAU

Biak, Maret 2021

PIHAK KEDUA



HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor



WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

## 2.3 Rencana Kinerja Program

Rencana Kinerja Program Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Rencana Kinerja Bappeda merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan memperhatikan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, disajikan pada Tabel 1

Tabel 1 Program/ Kegiatan Bappeda Biak Numfor Tahun 2021

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>7.720.205.264,00</b>	<b>8.356.517.364,00</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>6.605.068.780,00</b>	<b>6.317.068.780,00</b>
	<b>Total Pagu</b>	<b>14.325.274.044,00</b>	<b>14.673.586.144,00</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.628.458.780</b>	<b>6.370.388.780</b>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.605.068.780	6.317.068.780
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.390.000	53.320.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>166.050.000</b>	<b>166.050.000</b>
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.982.000	74.982.000
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.068.000	91.068.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.261.119.680</b>	<b>2.009.427.980</b>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.077.500	19.077.500
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.382.080	506.849.380
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	249.995.100	250.679.100

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	-
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	649.865.000	1.232.822.000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>124.904.914</b>	<b>227.404.914</b>
-	Pengadaan Mebel	49.921.250	49.921.250
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.983.664	177.483.664
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>495.276.320</b>	<b>525.076.320</b>
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	6.800.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.955.920	144.955.920
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.630.400	15.630.400
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.690.000	357.690.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>312.467.950</b>	<b>412.467.950</b>
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.590.000	112.590.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.880.000	199.880.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.997.950	99.997.950
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.554.598.500</b>	<b>1.499.444.300</b>
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	549.999.800	439.366.800
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.004.598.700	1.060.077.500

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>1.025.000.000</b>
-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	825.000.000	825.000.000
-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000
<b>3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>622.400.000</b>	<b>667.632.000</b>
-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	150.000.000	195.232.000
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	472.400.000	472.400.000
<b>C</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
<b>1</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>850.000.000</b>	<b>395.232.000</b>
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000	-
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	350.000.000	395.232.000
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>174.997.900</b>	<b>220.229.900</b>
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	174.997.900	220.229.900
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.145.232.000</b>

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	900.000.000	900.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	50.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000	195.232.000





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian Sasaran dan tolok ukur kinerja Program/kegiatan selama tahun 2021.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui gambaran tentang Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan perbandingan antara Rencana Kinerja Bappeda Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi program dan kegiatan.

Pengukuran tingkat Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, sedangkan hasil Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Kemudian hasil Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan tersebut dievaluasi agar mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 80 – 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### 3.1.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil(*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan menjadi:

- a) Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- b) Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e) Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

### 3.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator capaian kinerja yang akan dievaluasi dalam laporan ini adalah indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2

**Tabel 2 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Penyusunan LAKIP dan SAKIP	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan						

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Perangkat Daerah</b>						
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.317.068.780,00	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	87,99%	100%	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53.320.000,00	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	79,50%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.982.000,00	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	71,99%	100%	100%
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.068.000,00	Tersedianya Aparatur yang berkompeten	Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	0%	0%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.077.500,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	99,59%	100%	100%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	506.849.380,00	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi	72,30%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kepegawaian yang baik.			
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.679.100,00	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	81,94%	100%	100%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	0,00%	0%	0%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.232.822.000,00	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	83,34%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
-	Pengadaan Mebel	49.921.250,00	Tersedianya mebel	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100,00%	100%	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.483.664,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100,00%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>						

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Pemerintahan Daerah</b>						
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000,00	Terlaksananya jasa surat menyurat	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100,00%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.955.920,00	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	76,64%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.630.400,00	Terlaksananya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	19,19%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.690.000,00	Terlaksananya jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	88,54%	100%	100%
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.590.000,00	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	94,01%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.880.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100,00%	100%	100%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.997.950,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100,00%	100%	100%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>						
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	439.366.800,00	Terlaksananya musrenbang RKPDPD 2022	Tersusunnya RKPDPD yang sinergis dan berkelanjutan dengan program dan kebijakan perencanaan nasional	100%	100%	100%
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.060.077.500,00	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	66%	100%	100%
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	825.000.000,00	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan	84%	100%	100%
-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Terlaksananya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	195.232.000,00	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan pemantapan perencanaan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi	97%	100%	100%
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	472.400.000,00	Terlaksananya kegiatan monitoring program dan kegiatan tahun 2021	Evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Monitoring Reguler program kegiatan otsus 80% (OTSUS)	84%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>						
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	Master Plan Pendidikan	Master Plan Pendidikan	0%	0%	0%
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	395.232.000,00	Koordinasi Bidang Oprasional POKJA AMPL Penunjang/PendampingPenurunan stunting	Koordinasi Bidang Oprasional POKJA AMPL Penunjang/PendampingPenurunan stunting	84%	100%	100%
2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>						
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	220.229.900,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Ekonomi	98%	100%	100%



No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>						
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	900.000.000 ,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78%	100%	100%
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000, 00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur	98%	100%	100%
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	195.232.000 ,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Adanya Sinkronisasi dan Sinergitas Program dan kegiatan Perencanaan Bidang Kewilayahan	91%	100%	100%

Dari uraian pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa *Evaluasi Capaian Indikator Kinerja* dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Pada tahun anggaran 2021 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan 13 (tiga belas) diantaranya tidak mencapai target realisasi keuangan, namun target fisik telah maksimal dilaksanakan.

Adapun dari (tiga belas) sub kegiatan yang dimaksud, sbb ;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , realisasi keuangannya mencapai 87,99%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, realisasi keuangannya mencapai 79,50%

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, realisasi keuangannya mencapai 71,99%
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, tidak terealisasi keuangannya atau 0%
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi keuangan 99,59%
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 72,30%
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi keuangan 81,94%
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi keuangan 0%
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, keuangan 83,34%
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan 76,64%
- k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan 19,19%
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 88,54% dan
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi keuangan 94,01%

Berdasarkan kondisi dari 13 (tiga belas) kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian fisik yang tidak mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya mencapai 86,56%. Hal ini menggambarkan perlu adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan tahun 2021 guna menunjang pelayanan Kinerja administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aktifitas kesekretariatan Bappeda Kab.Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	100%
Keluaran: Tersedianya Laporan Penyusunan LAKIP dan SAKIP	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Laporan Penyusunan LAKIP dan SAKIP	12 bulan	12 bulan	100%

### **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Operasional Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.605.068.780,-	Rp.5.558.252.888,-	87,99%
Keluaran: Jumlah ASN	36 Orang	36 Orang	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Operasional Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.53.320.000,-	Rp. 42.390.000,-	79,50%
Keluaran: Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

### Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a). Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 74.982.000,-	Rp. 53.983.000,-	71,99%
Keluaran: Jumlah ASN	36 Orang	36 Orang	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	36 Orang	36 Orang	100%

b). Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 91.068.000	Rp. 0	0%

Keluaran: Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	14 Orang	0	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	14 Orang	0	0%

### Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### a). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.19.077.500,-	Rp.19.000.000	99,59%
Keluaran: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung/Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

#### b). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 506.849.380,-	Rp.366.430.000	72,30 %
Keluaran:			
Tersedianya Bahan BakarMinyak Kendaraan Dinas/Kantor	-12 bulan	-12 bulan	100%
Tersedianya Makanan dan Minuman	-12 bulan	-12 bulan	
Tersedianya Perlengkapan dan Bahan Pembersih Kantor	-12 bulan	-12 bulan	
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	-12 bulan	-12 bulan	100%
	-12 bulan	-12 bulan	
	-12 bulan	-12 bulan	

c). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 250.679.100,-	Rp.205.395.100	81,94%
Keluaran:	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan Penatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%
	12 bulan	12 bulan	

d). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp.0,-	0%
Keluaran:	12 bulan	0	0%
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan			
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan penatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	0	0%

e). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi SKPD			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 1.232.822.000,-	Rp. 571.747.400,-	75,47%
Keluaran: Tersedianya Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Sewa Mobilitas Darat Penunjang Operasional Dinas/Kantor	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai: Meningkatnya koordinasi antara bappeda dengan lembaga lain	12 bulan	12 bulan	100%

### Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan dan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%

#### a). Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.49.921.250,-	Rp.49.921.250,-	100%
Keluaran: Tersedianya Pengadaan Mebeleur	4 unit	4 unit	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	4 unit	4 unit	100%

#### b). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.177.483.000,-	Rp.177.483.000	100%
Keluaran: Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 unit	7 unit	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	7 unit	7 unit	100%

### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) sub kegiatan dan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%

#### a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.6.800.000,-	Rp.6.800.000,-	100%
Keluaran: Tersedianya Jasa Surat Menyurat	625 lembar	625 lembar	100%

Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	625 lembar	625 lembar	100%
---	------------	------------	------

b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.144.955.920,-	Rp. 111.100.000,-	76,64%
Keluaran: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik	12 bulan	12 bulan	100%

c). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.15.630.400,-	Rp. 3.000.000,-	19,19%
Keluaran: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik	12 bulan	12 bulan	100%

d). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.357.690.000,-	Rp. 316.690.000,-	88,54%
Keluaran: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai:	12 bulan	12 bulan	100%

Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik	12 bulan	12 bulan	
	12 bulan	12 bulan	

### Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%.

a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.112.590.000,-	Rp.105.850.000,-	94,01%
Keluaran: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%
	12 bulan	12 bulan	

b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.199.880.000,-	Rp.199.880.000,-	100%
Keluaran: Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%
	12 bulan	12 bulan	



c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.99.997.950,-	Rp.99.997.950	100%
Keluaran: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor pemeliharaan spase iklan jalur dua	12 bulan 1 kegiatan	12 bulan 1 kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan 1 kegiatan	12 bulan 1 kegiatan	100%

**B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada tahun anggaran 2021 dalam Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan besaran total anggaran Rp. 3.192.076.300,- (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp. 2.613.805.700 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 81,9%.

**1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

a). Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 439.366.800,-	Rp. 439.366.800,-	100%
Keluaran: Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2022	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Tersusunnya RKPD yang sinergis dan berkelanjutan dengan program dan kebijakan perencanaan nasional	1 dokumen	1 dokumen	100%

b). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp1.060.077.500,-	Rp. 694.669.800,-	66%
Keluaran: Terlaksananya Penyusunan RKPDPD TA 2022	19 distrik, 2 kali	19 distrik, 2 kali	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen RKPDPD TA 2022	1 dokumen	1 dokumen	100%

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a). Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 825.000.000,-	Rp. 693.819.800,-	84%
Keluaran: Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	1 dokumen	1 dokumen	
Pengumpulan Data, updating data analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	
penyusunan dan pengumpulan data informasi dokumen perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	
verifikasi usulan program kegiatan pembangunan daerah			
Hasil yang dicapai: Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	1 dokumen	1 dokumen	
	2 dokumen	2 dokumen	
	1 kegiatan	1 kegiatan	

b). Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	100%
Keluaran: Penyusunan buku KDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

**3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

a). Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Jumlah Dana	Rp. 195.232.000,-	Rp. 188.499.300,-	97%
Keluaran: Jumlah Koordinasi Pemantapan perencanaan	20 Kali	20 Kali	100%
Hasil yang dicapai: Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi	20 Kali	20 Kali	100%

b). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 472.400.000,-	Rp. 397.450.000,-	84%
Keluaran: Evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD	1 kali	1 kali	100%
Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	21 kali	21 kali	
Monitoring Reguler program kegiatan otsus 80% (OTSUS)		1 paket	
Hasil yang dicapai:	1 kali	1 kali	100%

	21 kali	21 kali 1 paket	
--	---------	--------------------	--

### C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Guna mendukung program perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah dialokasikan dana sebesar Rp. 395.232.000,- untuk membiayai sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dengan realisasi anggaran sebesar 84% dan realisasi fisik 100%

##### a). Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
Keluaran: Master Plan Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Hasil yang dicapai: Tersedianya Master Plan Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	0

##### b). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 395.232.000,-	Rp. 232.700.000,-	84%
Keluaran: Koordinasi Bidang Oprasional POKJA AMPL	20 kali	20 kali	100%
Penunjang/Pendamping Penurunan stunting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Hasil yang dicapai: Perencanaan 1 tahun pembangunan	20 kali	20 kali	100%
	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

#### 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Guna melaksanakan program perencanaan pembangunan ekonomi telah dialokasikan dana sebesar Rp. 220.229.900,- untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi keuangan sebesar Rp. 216.298.900 atau 98,2% dengan realisasi fisik 100%.

- a) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 220.229.900,-	Rp. 216.298.900,-	98,2%
Keluaran: Jumlah rapat Koordinasi yang terlaksana	30 kali	30 kali	100%
Hasil yang dicapai: Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Ekonomi	30 kali	30 kali	100%

### 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Guna mendukung program Pengendalian Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.145.232.000,- untuk membiayai 3 (tiga) Sub kegiatan yakni kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi anggaran sampai tahun anggaran 2021 berakhir sebesar Rp. 332.700.000 dan realisasi fisik 100%.

- a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 900.000.000,-	Rp. 698.503.400,-	78%
Keluaran: Dokumen KLHS RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Dokumen Master plan Kawasan Perbatasan Distrik Swandiwe-Bondifuar	1 Dokumen	1 Dokumen	
pemantapan Raperda revisi RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	
RENCANA DETAIL TATA RUANGDISTRIK	1 Dokumen	1 Dokumen	
REVISI PERDA RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	

Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1 Dokumen	1 Dokumen	
	1 Dokumen	1 Dokumen	
	1 Dokumen	1 Dokumen	
	1 Dokumen	1 Dokumen	

b). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.000.000,-	98%
Keluaran: Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kab. Biak Numfor	1 kali	1 kali	100 %
Hasil yang dicapai: Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur	1 kali	1 kali	100%

c). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 195.232.000,-	Rp. 177.119.000,-	91%
Keluaran: Jumlah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh	4 kali	4 kali	100 %
Hasil yang dicapai: Adanya Sinkronisasi dan Sinergitas Program dan kegiatan Perencanaan Bidang Kewilayahan	4 kali	4 kali	100%

### 3.2 Akuntabilitas

Dalam Tahun Anggaran 2021, jumlah Dana yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 sebesar **Rp. 14.325.274.044,-** (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari:

- a). Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 6.605.068.780,-**
- b). Belanja Langsung sebesar **Rp. 7.720.205.264,-**

Berdasarkan DPPA Tahun 2021 Pagu Anggaran Bappeda menjadi sebesar **Rp.14.673.586.144,-** (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar **Rp.8.356.517.364** (*Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.6.317.068.780** (*Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pada Pos belanja tidak langsung sampai dengan Desember 2021 telah direalisasikan sebesar **Rp. 5.558.252.888,00** atau telah mencapai **85,20%**. Sedangkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, jumlah dana pembangunan belanja langsung yang telah direalisasikan sebesar **Rp.6.943.921.450,-** (*Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau mencapai **83,10%**.

Bila prosentase realisasi keuangan dihitung secara rata-rata, maka prosentasi capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun Anggaran 2021 sebesar **84,15%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan Bappeda Biak Numfor tahun 2021 berada pada skala **Baik**.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan diatas, maka dapat dievaluasi ketercapaian indikator kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2020 kemudian dibandingkan dengan hasil kinerja pada tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Program	Tahun 2020		Persen (%)	Tahun 2021		Persen (%)
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belanja Tidak Langsung	977.620.000,00	924.850.000	94,60	6.317.068.780	5.558.252.888	87,99

2	Belanja Langsung	4.806.590.000,00	2.975.269.950	61,90	8.356.517.364	6.848.290.300	81,95
3	Total Pagu Anggaran	5.784.210.000	3.900.119.950	67,43	14.673.586.144	12.502.174.338	85,20

### 3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum

Faktor-faktor yang akan dinilai untuk mengukur Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum adalah:

#### a) Tingkat kehadiran pegawai

Jumlah hari kerja Staf Bappeda Kabupaten Biak Numfor dalam tahun anggaran 2021 sebanyak 236 hari kerja atau rata-rata 19,66 hari kerja per bulan dengan rata-rata tingkat kehadiran 34 pegawai Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Jika dibandingkan antara jumlah hari kerja per tahun dengan tingkat kehadiran pegawai Bappeda dalam tahun anggaran 2021, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran pegawai mencapai 87,17% atau berada pada skala *BAIK*.

#### b) Surat menyurat

Dalam tahun anggaran 2021, jumlah surat yang diterima oleh sekretariat Bappeda sebanyak 607 surat, sedangkan jumlah surat keluar sebanyak 833 lembar surat. Surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebanyak 59 surat, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 3 Surat dan 29 surat dari Bupati Biak Numfor.

#### c) Analisa tingkat kebutuhan pegawai

Dalam rangka menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor di masa yang akan datang, perlu untuk diperhatikan tingkat kebutuhan pegawai, yaitu:

- i. Pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan sesuai bidang tugas;
- ii. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II bagi pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- iii. Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Daerah dan Luar Daerah.





## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun dan selanjutnya diajukan kepada Bupati Biak Numfor dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Dari hasil analisa terhadap capaian kinerja, capaian sasaran, kinerja keuangan dan kinerja kepegawaian dan umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berada pada skala **Baik**.

Beberapa hal yang dapat diusulkan melalui laporan ini adalah hal-hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kinerja aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah :


- 1). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program pendidikan dan latihan teknis perencanaan.
- 2). Penguatan kapasitas lembaga melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV bagi aparat perencana.
- 3). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program sosialisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dalam daerah dan luar daerah.

Terkait usulan di atas dipandang sangat penting mengingat beban kerja dan tanggung jawab dalam upaya menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas. Disadari pula bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena adanya berbagai kendala yang dijumpai selama penyusunan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2021, namun kiranya kendala tersebut menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja aparat Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Sumbang saran demi perbaikan dan penyempurnaan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2022 sangat kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Biak Numfor, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Staf Ahli Bupati Biak Numfor, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2021, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membalas budi baik bapak/ibu/saudara sekalian.

Kepada seluruh aparat perencana yang telah mendedikasikan potensi diri, membangun sinergitas dan loyalitas, serta tetap mempertahankan semangat "Satu Tim" disampaikan rasa bangga dan terima kasih.

Biak, Januari 2022  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor

  
Wilson J. Titahena, S.Pi, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700908 199603 1 003